




PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PPSI DALAM RPJMN 2015-2019


Direktorat Pengairan dan Irigasi, Bappenas
Jakarta, Oktober 2018

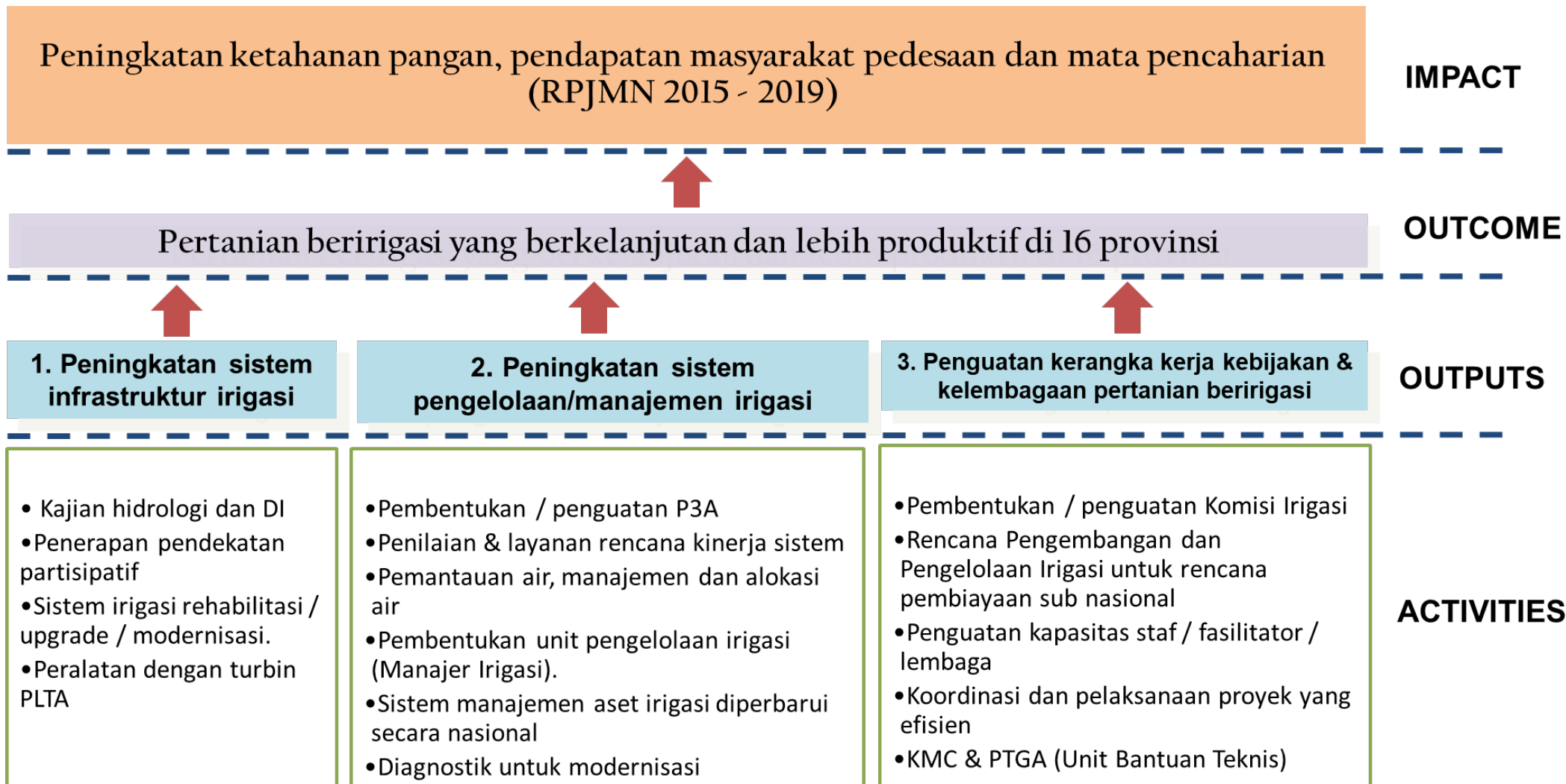


KETAHANAN PANGAN DALAM RPJMN 2015-2019

KEBIJAKAN UMUM	<p>Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok melalui 4 strategi utama :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri;2. Peningkatan produksi bahan pangan lainnya;3. Peningkatan produksi perikanan; dan4. Peningkatan layanan irigasi.
SALAH SATU STRATEGI UTAMA (Peningkatan layanan Irigasi)	<p>Peningkatan layanan jaringan irigasi, melalui internalisasi pengembangan sistem irigasi partisipatif (PPSIP) dalam dokumen perencanaan daerah</p>
SASARAN INFRASTRUKTUR IRIGASI	<ol style="list-style-type: none">1. pembangunan 1 (satu) juta hektar jaringan irigasi2. rehabilitasi 3 (tiga) juta hektar jaringan irigasi



KESELARASAN KEGIATAN IPDMIP DENGAN RPJMN 2015-2019





BUKU 1 - RPJMN 2015 - 2019

ARAH
KEBIJAKAN
DAN
STRATEGI
PEMANTAPAN
KETAHANAN
PANGAN
(BUKU 1
RPJMN 2015
- 2019: hal.
6-151)

1. PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI PADI DALAM NEGERI

2. PENINGKATAN PRODUKSI BAHAN PANGAN LAINNYA

3. PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN

4. PENINGKATAN LAYANAN JARINGAN IRIGASI

1. Pembangunan Jaringan Irigasi Baru...
2. Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi rusak...
3. Optimalisasi layanan irigasi melalui O&P jaringan irigasi
4. Pembentukan manajer irigasi sebagai pengelola pada satuan daerah irigasi
5. Peningkatan peran serta petani...melalui system out-contracting
6. Peningkatan efisiensi pemanfaatan air... (SRI, dll)
- 7. INTERNALISASI PPSIP DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH**
8. Pengembangan lahan rawa berkelanjutan

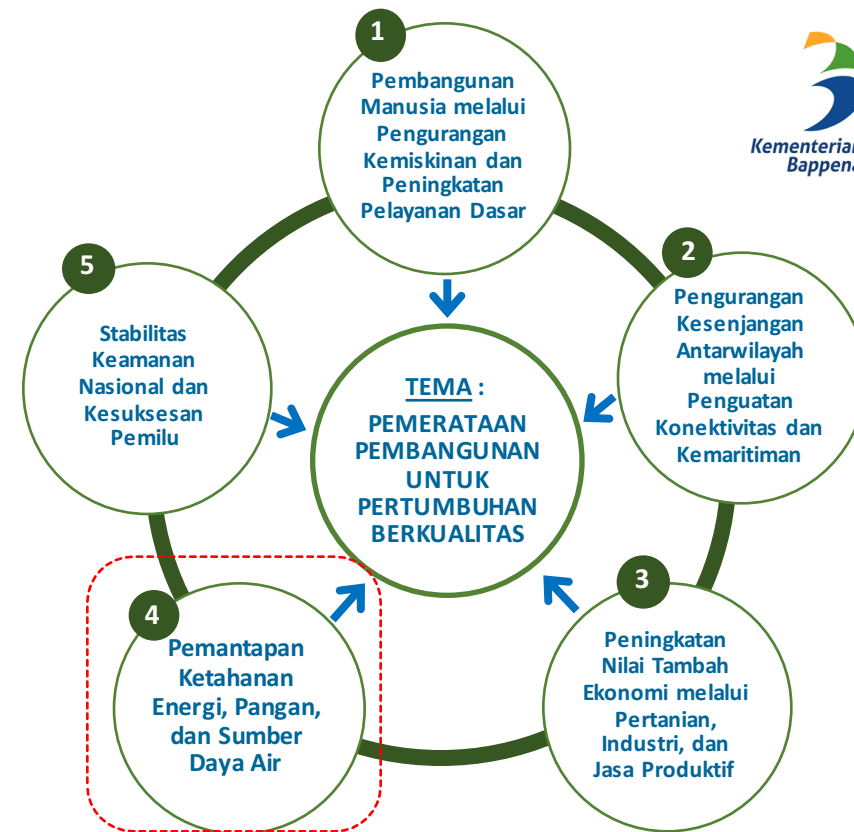


RENCANA KERJA PEMERINTAH 2019



- Kesenambungan Implementasi Pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial) dan *Money Follow Program*
- Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran (PP 17/2017)

	2018	2019
Menajamkan Prioritas Nasional	10 PN (Prioritas Nasional) 30 PP (Program Prioritas)	5 PN 25 PP
Memastikan Pelaksanaan Program	Pengendalian Dilakukan Sampai ke Level Proyek (satuan 3)	
Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan	Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah , PHLN, BUMN, PINA dan Swasta	



secara lebih rinci dijabarkan ke dalam Program Prioritas (PP), dan Kegiatan Prioritas (KP)

DALAM RANGKA MENGUPAYAKAN INTEGRASI :

- substansi (hulu-hilir/holistik);
- spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi);
- pembagian kewenangan antar-K/L, provinsi, kabupaten/kota;
- pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan);
- penatakelolaan (kerangka kelembagaan); dan
- kemudahan berusaha (kerangka pelayanan umum dan investasi)

RKP 2019 sebagai penjabaran tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI (PPSI) (Permen PUPR No. 30 Tahun 2015 Tentang PPSI)



PASAL 10 AYAT 1

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI ADALAH PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI BARU DAN /ATAU PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI YANG SUDAH ADA

PASAL 22 AYAT 1

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI ADALAH KEGIATAN YANG MELIPUTI OPERASI, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI DAERAH IRIGASI

PASAL 1
AYAT 4

SISTEM IRIGASI MELIPUTI PRASARANA IRIGASI, AIR IRIGASI, MANAJEMEN IRIGASI, KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

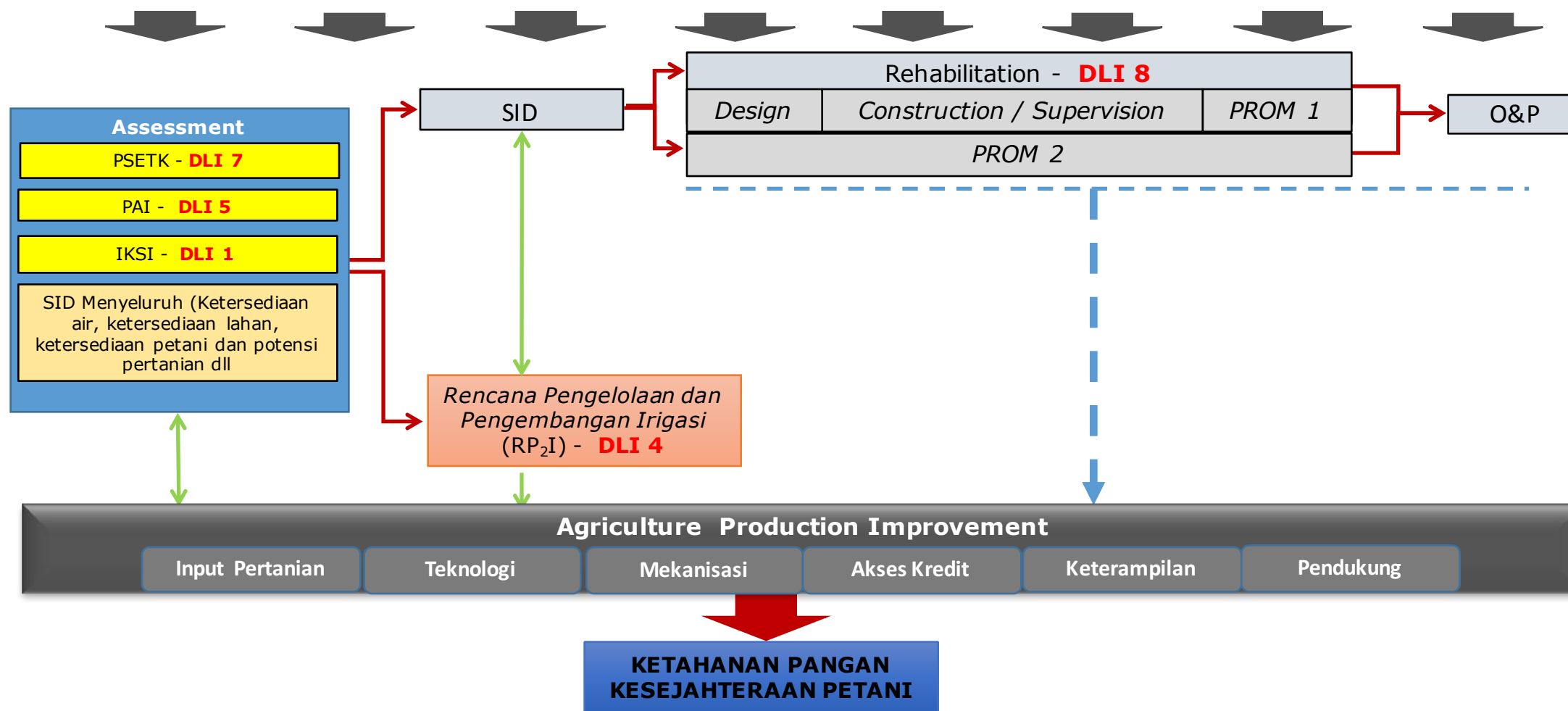
PASAL 10 (2) & Pasal
20 (4)

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PPSIP



ALUR KEGIATAN UTAMA PROGRAM IPDMIP

- ❖ Peraturan dan perundangan yang mendukung - **DLI 2**
- ❖ Dukungan anggaran pemerintah (internalisasi RP2I dalam RPJMD) Pedoman Teknis bidang Irigasi
- ❖ Institutional Arrangement / Farmer Participation : **KOMIR (DLI 3), WUA (DLI 6), WUAF ; IMU**





KETERPADUAN PROGRAM IPDMIP

PERENCANAAN PROGRAM

- 1) PENETAPAN LOKASI – DAERAH IRIGASI KESEPAKATAN (dengan total area 875.245 ha (778 DI)
- 2) URUTAN KEGIATAN – Secara Garis Besar:
 - Kesiapan infrastruktur
 - Penguatan kelembagaan di tkt. Petani
 - Pengembangan Pertanian dan
 - Peningkatan Pendapatan Petani.
- 3) PENYUSUNAN AWP

PELAKSANAAN KEGIATAN

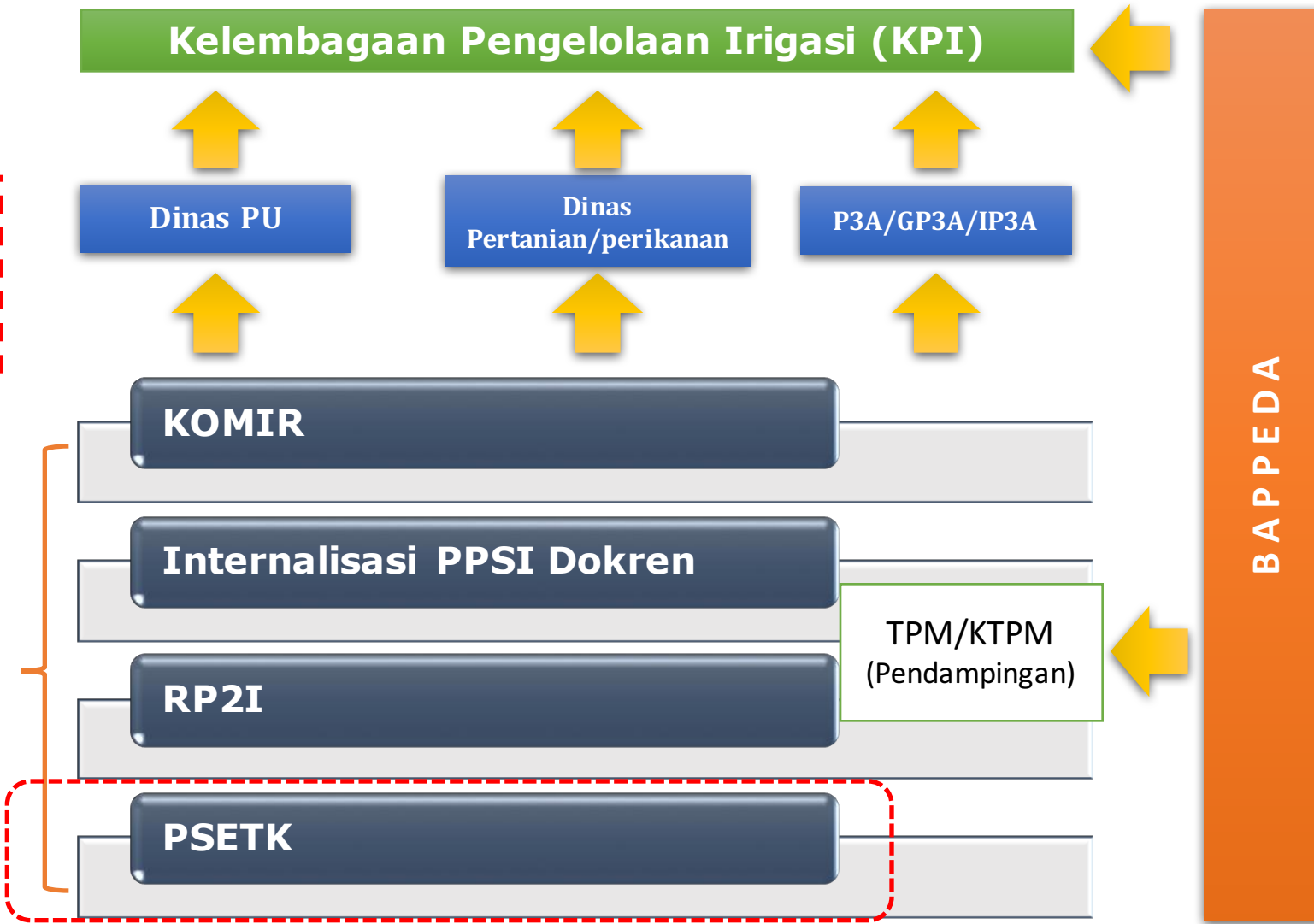
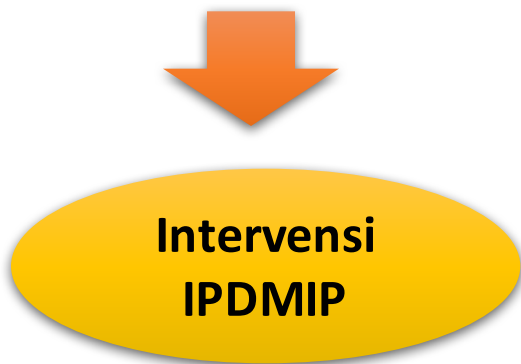
- 1) PSETK: harus dibangun dari kondisi eksisting infrastruktur, kelembagaan, sosial dan ekonomi petani → sebagai masukan untuk penyusunan RP2I dan SID/DED
- 2) Tenaga Pendamping Masyarakat, membina petani dalam:
 - Mengaktifkan P3A dan atau kelompok tani dibidang tata kelola irigasi
 - Membantu pelaksanaan program komponen pertanian
- 1) Kelompok Pendamping Masyarakat, terdiri dari: PPL, TPM, Juru dan Pengamat
- 2) Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Daerah (RP2I)



INTEGRASI PERENCANAAN

Salah satu *output* IPDMIP dibawah koordinasi SUPDI :

- **Penguatan kebijakan dan kerangka kelembagaan untuk pertanian beririgasi** akan fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.





Hal yang Perlu Perhatian

- ❑ Dalam pemilihan daerah irigasi kesepakatan antara Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pertanian serta B/BWS dengan memperhatikan tidak adanya intervensi dari program lainnya (APBN/APBD, DAK dan program lainnya)
- ❑ Daerah perlu memperhatikan capaian target pada DLI 3 (Komisi Irigasi) dan DLI 7 (Penyusunan PSETK)
- ❑ Perlu pemahaman bersama mengenai urutan/tahapan/*timeline* pelaksanaan kegiatan terutama pada kegiatan yang pelaksanaannya dibawah koordinasi NPIU yang berbeda, seperti pada kegiatan KOMIR, pelaksanaan PPSI, dan penyusunan PSETK;
- ❑ Panduan PSETK sudah siap dan TPM Propinsi atau Balai/Balai Besar sudah harus siap;



T E R I M A K A S I H

DIREKTORAT PENGAIRAN DAN IRIGASI, BAPPENAS

JL. TAMAN SUROPATI NO.2 MENTENG
JAKARTA PUSAT 10310 – INDONESIA

air@bappenas.go.id
dit.pengairan.irigasi@gmail.com